

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Ternate (Studi Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate)

Oleh
Syarifuddin M. Adam¹
Patar Rumapea²
Wehelmina Rumawas³

Abstract

The purpose of this study was to determine how much influence the empowerment of SMEs to Community Economic Development Kota Ternate . In carrying out this study , the type of research is qualitative descriptive approach in which researchers wish to dig symptoms directly in the field with a descriptive form , this method is used due to ease writers that aims to identify and describe the corresponding problems presented previously (Sanapiah , 2001. 52-53) .

Based on the results of research in the field shows that MSMEs have responsibilities conceptual in nature must be expressed , one way is with the policy in the form of regulations by the government with its agencies in the field of empowerment of SMEs .

Keywords: Empowerment, policy

PENDAHULUAN

Tujuan penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dipelajari dari pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Semakin tinggi peningkatan PDRB di suatu daerah, semakin tinggi juga peningkatan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan hasil pembangunan. Pertumbuhan PDRB di suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang semakin mengglobal, tetapi

¹ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

² Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

³ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah yang berupaya mengarahkan pertumbuhan ekonomi di daerah, antara lain dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas UKM di suatu daerah menjadi sangat penting dalam proses pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

Bila pelaksanaan berbagai kebijakan dan kegiatan pembangunan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang diselenggarakan pemerintah berlangsung efektif, maka efektivitas pembangunan tersebut merupakan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, kinerja Dinas UKM Kota Ternate menjadi sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Ternate. Kinerja Dinas UKM yang optimal dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang umkm, tentu tidak hanya bertujuan mewujudkan kondisi perekonomian yang kondusif bagi para pelaku ekonomi, tetapi sekaligus juga menstimulasi perluasan lapangan kerja.

Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi, dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha yang semakin terpuruk, sementara umkm serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Kedudukan umkm dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Di samping itu umkm juga memiliki potensi penghasil devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara umum umkm memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, namun kenyataannya masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangan umkm tersebut. Di Kota Ternate selama periode 2012-2014 jumlah umkm dari 8.282 pada tahun 2012 menjadi 11.095 umkm pada tahun 2014. Berdasarkan data tersebut pada tahun 2014 terdapat sekitar 54 unit usaha yang tidak lagi berfungsi dengan demikian terdapat 11.041 unit usaha yang aktif.

Berdasarkan hasil rekapitulasi umkm Kota Ternate pada tahun 2012 terdapat 8,282 unit usaha dengan rincian 5.019 usaha mikro, 2.477 usaha kecil dan

786 usaha menengah. Kemudian, pada tahun 2013 terjadi lagi peningkatan pada usaha mikro dan usaha kecil dengan rinciannya 5.519 usaha mikro, 2.801 usaha kecil dan 786 usaha menengah, dengan demikian pada tahun 2013 terdapat 9,106 unit usaha. Pada tahun 2014 terdapat 11,041 unit usaha yang aktif dan 54 unit usaha yang tidak aktif, rinciannya adalah 6,822 usaha mikro, 3,466 usaha kecil yang aktif, 807, usaha menengah dan 54 unit usaha yang tidak aktif. (Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate). Dalam hal ini, adalah kelemahan akses pada informasi dan perluasan pangsa pasar, kelemahan akses dan pemupukan modal, kelemahan akses pada informasi dan teknologi, kelemahan dalam manajemen organisasi, serta kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Dinas UKM Kota Ternate untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di bidang umkm sangat diperlukan, terutama dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Ternate yang selama ini belum optimal dikalangan umkm.

Dampak dari kinerja yang belum optimal itu tentu tidak terbatas hanya persoalan-persoalan internal Dinas UKM Kota Ternate, tetapi dapat juga berdampak pada aktivitas-aktivitas para pelaku ekonomi di Kota Ternate. Misalnya pelayanan perizinan usaha yang tidak efektif, menyita waktu lama dan menyerap biaya tinggi tentu tidak hanya menghambat upaya perluasan lapangan kerja melalui pengembangan berbagai usaha. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kinerja Dinas UKM Kota Ternate yang profesional dan akuntabel dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan serta transparan dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik perlu dilakukan secara terpola, menyeluruh dan berkesinambungan.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar dalam negeri, merupakan ancaman bagi usaha kecil dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dari dampak globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan usaha kecil saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, sehingga kemandirian umkm diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam pembangunan ekonomi usaha mikro maupun kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha mikro maupun usaha kecil, baik di sektor tradisional maupun di sektor modern.

Usaha pengembangan yang telah dilaksanakan pemerintah masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan umkm sangat kecil dibandingkan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan umkm oleh pemerintah selama orde baru hanya sedikit yang dilaksanakan, lebih banyak hanya semboyan saja sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hamper di semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dalam pemberdayaan umkm masih lemah kinerja yang diberikan oleh pegawai dalam melayani masyarakat. Lemahnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dalam umkm disebabkan lemahnya kepemimpinan yang berlangsung di antara unsur-unsur pimpinan dengan unsur-unsur staf dan lemahnya motivasi kerja para pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengangkat judul “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Ternate”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang dipakai yakni tipe dan jenis penelitian, yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut : Tahap Reduksi Data, Tahap Penyajian Data, Tahap Verifikasi Data untuk kesimpulan. Metode ini digunakan karena untuk mempermudah penulis yang bertujuan untuk mengetahui, dan menggambarkan sesuai masalah yang diajukan sebelumnya, (Sanapiah Faisal, 2001;52-53).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bagian integral dunia usaha nasional. Mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional, terutama usaha mikro dan kecil karena kedua usaha tersebut merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian rakyat Indonesia. Dalam upaya membangun ekonomi nasional sub-sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang dalam istilah sering disebut UMKM. Usaha mikro dan kecil mendapat prioritas untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Sektor industri baik skala besar maupun skala mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu sektor yang turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, oleh karena itu kebijakan pembinaan dan pengembangan terhadap masing-masing sub-sektor dilakukan secara berkesinambungan dan program pembinaan senantiasa dikembangkan sesuai dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi

Pemberdayaan Usaha mikro, kecil, dan menengah sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, dalam menghadapi pasar global agar usaha mikro, kecil, dan menengah mampu bersaing dalam era yang ditandai oleh semakin ketatnya persaingan. Kunci dalam memenangkan persaingan adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi. Untuk itu maka setiap usaha mikro, kecil, dan menengah harus mempersiapkan diri antara lain memproduksi atau menghasilkan suatu produk yang berkualitas tinggi, melakukan diferensiasi supaya memiliki daya saing tinggi. Dan kata lain, usaha mikro, kecil, dan menengah harus menghasilkan produk yang berbeda dengan yang lain agar mempunyai pangsa pasar, bergerak dalam satu jenis tertentu.

Kegiatan usaha tersebut jugharus menangkap peluang usaha yang berbasis sumberdaya setempat terutama yang dapat meraih peluang ekspor.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pemerintah Kota Ternate adalah unsur pelaksana pemerintah kota dibidang pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah, kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas koperasi dan ukm pemerintah kota Ternate mempunyai fungsi pembinaan, pengawasan, pendidikan, serta pembangunan dibidang UKM. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembinaan Usaha Mikro dan kecil memerlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum maju dan dengan pihak yang belum berkembang. Pembinaan usaha mikro dan kecil merupakan peningkatan harkat dan martabat masyarakat dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembinaan usaha mikro dan kecil seperti sirup pala melalui pembinaan pengusaha mikro dan kecil produksi sirup pala mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi dan ketrampilan teknis para pengusaha kecil yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan pekerjaan baru. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah dan masyarakat dalam hal ini para pengusaha harus saling kerja sama.

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian Indonesia ternyata belum mampu meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat Internasional, terutama di regional ASEAN. Hasil penelitian *Word Economic Forum* terhadap 59 negara termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-37 pada tahun 1992. Rendahnya daya saing ekonomi Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Permasalahan pokok yang sering dihadapi sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah antara lain pemasaran, keuangan, manajemen, teknologi, lokasi, sumberdaya manusia, dan struktur ekonomi.

2. Masalah-Masalah yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menurut data base dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM (Menekop dan UKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1997 ada sekitar 39,7 juta usaha mikro kecil (UMK) dengan nilai penjualan rata-rata pertahun kurang lebih Rp. 1 miliar per unit atau sekitar 99,8 % dari total unit usaha pada tahun itu. Pada tahun 1998 saat krisis ekonomi mencapai titik terburuknya dengan dampak negatif yang sangat besar terhadap hampir semua sektor ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan dari berbagai skala usaha mengalami kebangkrutan atau mengurangi volume kegiatan secara drastis. Pada saat itu Menekop dan UKM memperkirakan hampir 3 juta UMK berhenti berusaha dan jumlah usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) yang tutup usaha, masing-masing sekitar 14,2 atau 12,7% dari jumlah unit masing-masing kelompok.

Pada tahun 1997/98 tercatat ada sekitar 39,7 juta UMK atau 99,85% dari jumlah perusahaan berbagai skala usaha di Indonesia. Pada tahun yang sama ada sekitar 78,8 juta UM dengan rata-rata nilai penjualan pertahun berkisar lebih dari Rp. 1 juta dan kurang dari Rp. 50 miliar atau 0,14 % dari semua usaha yang ada.

Pada tahun 2008 jumlah populasi UMK dan UM mencapai sekitar 52,3 juta unit dan bertambah lagi menjadi 52,7 juta unit pada tahun 2009 yaitu 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 52,769 juta unit usaha. Pada tahun 2009 unit usaha di Indonesia berjumlah 52,769 juta unit usaha. Pada tahun 2011 jumlah UMK tercatat sekitar 47 juta, sedangkan jumlah UM mencapai hampir 95 juta unit. Pada tahun 2013 jumlah UMK mencapai sekitar 99,77 % dari jumlah usaha yang ada di Indonesia, sedangkan jumlah UM dan UB masing-masing 0,22 dan 0,01%. Namun demikian, laju pertumbuhan unit usaha dari kelompok UM jauh lebih tinggi dibandingkan UMK. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sehingga sulit berkembang antara lain :

1. Faktor Internal

Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Terkait dengan hal ini, UMKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana diisyaratkan adanya bangunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu.

Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi harus dibuka untuk UMKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDMnya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah

mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

1. Mentalitas Pengusaha UMKM

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UMKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UMKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.

2. Kurangnya Transparansi

Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UMKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

B. Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestic brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha Mikro, kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap bruto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UMKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

1. Pungutan Liar

Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UMKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

2. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis Mikro, kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

2. Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha Mikro, kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UMKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu, UMKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

3. Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

4. Terbatasnya Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UMKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UMKM,

sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UMKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UMKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik. Sesungguhnya pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk pemberdayaan UMKM, terutama lewat kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit program untuk pengembangan UMKM bahkan dilakukan sejak 1974.

Sebagaimana proses pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan UMKM juga tidak jauh berbeda dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan UMKM sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat pelaku-pelaku UMKM agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antara mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika agen pengubah, baik yang berasal dari lembaga pemerintahan atau nonpemerintah telah menyelesaikan program pemberdayaan UMKM tersebut, pemberdayaan UMKM sebagai suatu proses dapat terus berlangsung.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.

Tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan

masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/sector dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selama ini sering berduplikasi antar proyek sehingga diharapkan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir dapat diwujudkan.

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kota Ternate maka dibutuhkan peran serta pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate untuk menumbuh kembangkan UMKM khususnya di wilayah kota Ternate sehingga kedepannya menjadi usaha yang lebih produktif dan berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan umkm mempunyai tanggung jawab yang sifatnya konseptual tersebut perlu diwujudkan, salah satu caranya adalah dengan adanya kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan oleh pemerintah dengan instansi-instansinya di bidang pemberdayaan UMKM.

PENUTUP

Berdasarkan penjabaran dalam hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah kota Ternate di antaranya bimbingan serta pemberdayaan terhadap umkm dan juga telah memfasilitasi produk-produk umkm untuk memperoleh pengukuhan modal dari BUMN dan perbankan. Bahkan juga dengan adanya PNPM Mandiri dari pemerintah untuk menunjang kemajuan umkm di kota Ternate sangat mendapat respon positif dari sebagian besar masyarakat kota Ternate dalam memajukan taraf ekonominya di kota Ternate.

Atas dasar kesimpulan pada bagian sebelumnya maka dapat di berikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah harus lebih memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat dengan cara peningkatan kinerja akses pada informasi dan perluasan pangsa pasar agar hasil kerjanya semakin baik dan meningkat dengan karena adanya kebijakan-kebijakan tersebut bisa membuat kesejahteraan kepada masyarakat dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Ternate.
2. Bagi masyarakat sebagai pelaku UMKM seharusnya membuka pemikiran untuk tidak bersikap pragmatis dalam menerima pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Dengan adanya pelatihan maupun penyuluhan sebaiknya digunakan sebagai kesempatan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan produk usaha yang lebih inovatif dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Saifudin. 2002. *Metode Penelitian, Edisi Revisi VI, Cat Tiga*, PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Anonim. (2005). Kompas, ” Presiden Canangkan Aksi Penanggulangan Kemiskinan-Melalui Pemberdayaan Umkm”,
- Bank Indonesia. 2006. “Kajian Pola Pembiayaan dalam Hubungan Kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar.”
- Creswell, J.W. 2003. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 2nd edition. London, New Delhi : Sage Publications.
- Darwin, ed. 2003. *Model-Model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta : Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.
- Mubyarto, 2013 “Pengertian Pemberdayaan” Laskar Aksara Jakarta Timur
- Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta
- Maleong J. Lexy, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Kariaya*, Bandung.
- Nasir, 1998. Pasalog Harbani, 2007, *Metode Penelitian Administrasi* Cet. Pertama Lembaga Penerbit UNHAS (lephas) Makassar.

Prijono, S.Onny dan Pranarka, A.M.W (1996:55). Tentang Pengertian Pemberdayaan. 201-208 pp.

Ratmoko, 2002. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi, Haji Mas Agung. Jakarta

Sanapiah Faisal, 2001. *Format-format penelitian Sosial*, PT. Rajawali Press. Jakarta